

BAB 7

STRATEGI INVESTASI

Terdapat berbagai alasan mengapa wilayah Provinsi Papua Barat harus mendapat prioritas pembangunan kedepan. Pertama, wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kandungan minyak dan gas yang sangat besar. Kedua, selain minyak dan gas juga memiliki kandungan mineral yang menjanjikan seperti halnya mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, gypsum dan batubara). Ketiga, wilayah Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya hutan dan perairan yang sangat besar yang tingkat pemanfaatannya masih jauh di bawah potensi lestariannya. Keempat, wilayah Provinsi Papua Barat memiliki potensi pengembangan pertanian dan agribisnis yang sangat besar. Kelima, wilayah Provinsi Papua Barat memiliki potensi pariwisata yang besar dan beragam. Kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah dan nasional dengan merubah paradigma pembangunannya.

Kendati demikian, pengembangan investasi di wilayah Provinsi Papua Barat tidaklah semudah yang dibayangkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat selama kurun waktu hingga tahun 2006 adalah buruknya kinerja investasi sebagai akibat dari berbagai permasalahan pada setiap tahapan investasi. Keadaan tersebut menyebabkan tidak bergairahnya para investor untuk melakukan investasi di Papua Barat, baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Tidak bergairahnya investasi berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang selama ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan konsumsi daripada investasin.

7.1. Permasalahan Investasi Di Papua Barat

Permasalahan dan tantangan pengembangan wilayah dan investasi yang dihadapi Provinsi Papua Barat dalam 20 tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran, serta strategi pengembangan wilayah yang juga harus bersifat lintas kaitan sektoral dan lintas koordinasi. Peningkatan investasi di Papua Barat menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan baru berhasil diidentifikasi seperti pada Bab 6, dan penetapannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah belum dilakukan.
- 2) Potensi komoditi di setiap kawasan pengembangan baru berhasil diidentifikasi seperti juga pada Bab 6, dan identifikasi kelayakan ekonomi maupun finansialnya belum diketahui..
- 3) Rendahnya kepastian hukum. Rendahnya kepastian hukum tercermin dari banyaknya kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah dan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kewenangan daerah dalam kebijakan investasi menjadi kurang jelas. Keragaman kebijakan investasi antar kabupaten yang pada

- gilirannya menurunkan minat investasi. Beberapa regulasi di tingkat pusat memiliki ambiguitas hukum yang tinggi sehingga memunculkan keraguan di daerah untuk implementasinya dan justru menciptakan hambatan besar bagi perkembangan investasi.
- 4) Lemahnya insentif investasi. Dibandingkan dengan daerah lain, Papua Barat relatif tertinggal dalam menyusun insentif investasi, termasuk dalam bidang perpajakan dan retribusi, serta Peraturan-Peraturan Daerah lainnya dalam menarik penanaman modal di Papua Barat. Semangat Otonomi Daerah dalam perjalanannya justru banyak melahirkan hambatan investasi. Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/Kota justru menciptakan regulasi-regulasi yang menyebabkan minat investasi menjadi berkurang. Investor sangat menginginkan regulasi dengan tingkat birokrasi yang sederhana. Pelayanan yang lambat akibat birokrasi yang berbelit-belit menciptakan biaya tinggi dan bertentangan dengan filosofi usaha yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan.
 - 5) Kualitas Investor Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Kurang bergairahnya iklim investasi di Papua Barat juga disebabkan oleh relatif masih rendahnya kemampuan investor skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Kegiatan penanaman modal di Papua Barat selama ini lebih dominan pada pengembangan usaha yang bersifat eksploitatif sumberdaya alam dan belum mengarah pada pengembangan manufaktur yang berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi. Pola investasi yang demikian pada akhirnya justru memberi peluang besar kepada investor skala besar dan investor asing dengan kesiapan modal dan sumberdaya yang sangat memadai. Dampak lanjutnya adalah kerugian yang lebih besar di mana keuntungan investasi justru mengalir keluar sehingga sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi yang merupakan bagian terbesar pelaku ekonomi di Papua Barat tidak diberdayakan.
 - 6) Terbatasnya infrastruktur. Keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya koleksi dan distribusi yang pada gilirannya memperburuk daya saing produk yang dihasilkan oleh Provinsi Papua Barat. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, dan jaringan telekomunikasi merupakan faktor penyebab utama tingginya biaya produksi, biaya koleksi dan biaya distribusi.
 - 7) Kesenjangan antar pelaku ekonomi. Perkembangan yang terjadi dewasa ini berupa keinginan kuat dari daerah untuk segera terealisasinya otonomi daerah secara nyata, semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan kredibilitas dalam konteks "good governance" serta globalisasi ekonomi berimplikasi pada keharusan untuk mengubah beberapa paradigma dalam pelaksanaan strategi pembangunan dan investasi. **Pertama**, Pemerintah bukanlah satu-satunya agen pembangunan sehingga pembangunan harus dijalankan secara partisipatif dan melibatkan secara optimal komponen-komponen yang ada di masyarakat. Pemerintah selayaknya hanya bertindak sebagai fasilitator, stimulator dan dinamisator pembangunan dengan komitmen menciptakan kemakmuran seluas-luasnya bagi masyarakat. **Kedua**, strategi pembangunan harus bebas dari pengaruh politik, kalau tidak akan terjadi "moral hazard" dan "policy hazard" pada aras pelaksanaan dan perencanaannya. Akibatnya, investasi akan bias pada penguatan kelompok tertentu. **Ketiga**, menempatkan masyarakat sebagai subyek sehingga akan membentuk tanggungjawab atas proses dan hasil-hasilnya. Dengan menempatkan rakyat sebagai subyek, potensi kewirausahaan yang ada

- pada lapisan bawah akan tereksplorasi secara optimal, sehingga akan tercipta kelas wirausaha yang produktif dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah, dan bukan kelas konsumen belaka yang konsumtif dan boros. Oleh sebab itu, tantangan riil investasi di Papua Barat adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi.
- 8) Tingkat kemahalan. Biaya-biaya ekonomi tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha secara langsung berpengaruh pada kemampuan daya saing produk-produk yang dihasilkan, serta kurangnya minat untuk melakukan investasi. Faktor penyebab mahalnya biaya investasi di Papua Barat secara umum disebabkan oleh : masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, belum terjaminnya keamanan berusaha (terkait dengan penegakan hukum), belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) baik PERDASUS maupun PERDASI yang mengatur tentang kegiatan investasi, dan belum konsistennya antara peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.
 - 9) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi. Sampai dengan saat ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan di Papua Barat banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, pengecer dan grosir) serta banyaknya pungutan dan peraturan daerah sebagai akibat otonomi daerah. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing produk, yang akibatnya lebih jauh adalah kelesuan untuk meningkatkan volume produksi. Perbaikan dalam sistem koleksi dan distribusi selain bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh terdorongnya integrasi komponen-komponen produksi yang terkait di Provinsi Papua Barat.

7.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya peningkatan investasi di wilayah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

- 1). Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan yang telah diidentifikasi sesuai dengan komoditas unggulan (baik yang sudah diusahakan maupun yang masih potensial) dengan strategi penempatan kegiatan investasi mengikuti sumber bahan baku.
- 2). Adanya insentif atau iklim investasi yang kondusif dalam bentuk revitalisasi kelembagaan ekonomi yang mampu mengurangi hambatan berinvestasi. Revitalisasi tersebut mencakup regulasi antar sektor dan antara pusat dan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan terkait penyederhaan prosedur perijinan, penyempurnaan sistem perpajakan dan retribusi, penegakan hukum untuk keamanan berusaha dan ketertiban berusaha. Insentif lainnya adalah terbentuknya sistem infrastruktur yang terpadu antar kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan , sehingga berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem koleksi dan distribusi wilayah Provinsi Papua Barat untuk menciptakan perdagangan yang kondusif dan dinamis.
- 2). Adanya kepastian hukum dalam bentuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah, antar daerah. Disamping itu, adanya sistem dan prosedur investasi yang jelas akan meningkatkan minat investasi.

- 5). Meningkatnya investasi secara bertahap terutama di kawasan-kawasan prioritas sehingga peranannya terhadap PDRB meningkat dengan penyebaran yang semakin merata;
- 6). Meningkatnya surplus perdagangan Papua Barat, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor;

7.3. Strategi Investasi

Berdasarkan permasalahan dan tantangan, keterbatasan yang dihadapi serta sasaran yang hendak dicapai, maka ditetapkan 5 (lima) agenda pengembangan wilayah dan investasi sebagai berikut :

7.3.1. Agenda mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan.

Strategi untuk merealisasikan agenda ini adalah melakukan Sinkronisasi dalam rangka mendorong investasi yang intensif untuk menghidupkan Kawasan Pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan. Sinkronisasi juga diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Barat serasi dengan Rencana Tata Ruang Nasional.

7.3.2. Agenda Mewujudkan sistem infrastruktur yang terpadu

Berkaitan dengan agenda mewujudkan sistem infrastruktur yang terpadu disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

A. *Transportasi*

Strategi pengembangan transportasi dilakukan dengan memberi fokus pada aspek pokok, seperti di bawah ini

A.1. *Transportasi Darat*

1. Meningkatkan aksesibilitas kawasan potensial untuk menerobos isolasi sektor-sektor ekonomi dasar yang sudah ada.
2. Pemantapan sistem jaringan jalan kabupaten terhubung dengan daerah-daerah sasaran pengembangan investasi.
3. Pengembangan sistem angkutan umum /angkutan pedesaan dan pemantapan struktur jalan yang memadai.
4. Sistem transportasi darat yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dengan fokus pada terhubungkannya jaringan sirkulasi produk antar pusat-pusat pertumbuhan investasi.
5. Pemerintah daerah mengupayakan adanya kendaraan umum/angkutan pedesaan yang memiliki jangkauan trayek ke daerah-daerah potensial dengan biaya transportasi yang terjangkau dengan kemampuan masyarakat.

6. Pemerintah daerah mengupayakan jalinan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat.

A.2. Transportasi Laut

- 1) Sistem transportasi laut diarahkan dapat meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah yang masih terbelakang.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas kawasan potensial untuk menerobos isolasi sektor-sektor ekonomi dasar yang sudah ada.
- 3) Meningkatkan armada kapal laut yang menghubungkan semua daerah potensial dengan biaya transportasi yang terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Alternatif pengembangan pelabuhan penyeberangan sungai di Teluk Bintuni dan Sorong Selatan.
- 5) Alternatif pengembangan pelabuhan feri untuk penyebarangan pulau-pulau di Raja Ampat dan Teluk Wondama
- 6) Pemerintah daerah mengupayakan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana transportasi laut.

A.3. Transportasi Udara

- 1) Pemerintah daerah mengupayakan terciptanya pelabuhan udara pada setiap kabupaten atau daerah potensial yang ada di Provinsi Papua Barat.
- 2) Biaya transportasi udara dapat disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
- 3) Mengupayakan fasilitas pelabuhan udara yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan investasi.
- 4) Meningkatkan pembangunan pelabuhan udara yang sudah ada dengan melakukan perbaikan dan perpanjangan landasan pacu.
- 5) Pemerintah daerah mengupayakan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana transportasi udara.

B. Energi

Untuk mencapai sasaran di atas, maka strategi yang harus dilakukan untuk pemanfaatan sumber energi tersebut adalah :

- 1) Melakukan pengawasan dan monitoring untuk memperoleh data dan informasi yang akurat
- 2) Melakukan pengawasan dan pemasaran mineral dan batubara, minyak dan gas bumi
- 3) Melakukan sosialisasi dan promosi tentang potensi energi yang tersedia.
- 4) Melakukan pengkajian dan analisis pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan.
- 5) Menjalinkan hubungan kerjasama kepada badan usaha mineral dan batubara, serta migas.

- 6) Memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan investasinya dalam melakukan eksploitasi sumberdaya mineral dan batubara, serta migas.

C. Listrik

Dalam rangka mewujudkan sasaran pengembangan investasi, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efisiensi pemakaian energi listrik pada instansi pemerintah
2. Mengupayakan pemanfaatan sumberdaya hidro yang tersedia di daerah sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
3. Pemanfaatan energi pasang surut sebagai alternatif penyediaan energi listrik di daerah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
4. Mengupayakan adanya pembangkit energi listrik alternatif (tenaga surya) pada daerah potensial untuk pengembangan investasi.

D. Air Bersih

Untuk mewujudkan sasaran pengembangan investasi, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Mengembangkan pola kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membangun instalasi air bersih.
2. Mencari sumberdaya air baru yang memiliki potensi untuk diinvestasikan sebagai sumber air minum dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air yang sudah ada

E. Pos dan Telekomunikasi

Strategi untuk mewujudkan sasaran penggunaan pos dan telekomunikasi sebagai salah satu insentif untuk merangsang terjadinya investasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidang telekomunikasi
2. Memperbanyak stasiun-stasiun pembantu pada daerah sektor ekonomi dasar.
3. Memberikan kemudahan kepada pihak pengguna telekomunikasi (masyarakat) dalam mendapatkan pelayanan

7.3.3. Agenda Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kapasitas kelembagaan

Strategi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kapasitas kelembagaan, mencakup 3 aspek pokok, sebagai berikut:

- 1). Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi melalui penyederhanaan perijinan dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- 2). Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif;

- 3). Merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi sehingga Papua Barat menjadi menarik sebagai tujuan investasi;

7.3.4. Agenda Mewujudkan kepastian hukum, sistem dan prosedur investasi yang jelas

Strategi untuk mewujudkan kepastian hukum, dan sistem serta prosedur investasi, mencakup 4 aspek pokok, sebagai berikut:

- 1). Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property right) terutama berkenaan dengan penguasaan lahan;
- 2). Memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha;
- 3). Membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi;
- 4). Menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas;

7.3.5. Agenda meningkatkan investasi dan surplus perdagangan

Untuk meningkatkan investasi dan surplus perdagangan, dilakukan dengan menggunakan strategi, sebagai berikut:

- 1). Mengembangkan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar dalam bentuk "backward linkage", "forward linkage", "capital linkage" dan "sales linkage".
- 2). Kebijakan permodalan yang menjamin kepastian ketersediaan modal untuk menjamin keberlangsungan usaha;
- 3). Kebijakan pengembangan manajerial yang sesuai dengan UMKM serta koperasi;
- 4). Kebijakan pengembangan kewirausahaan melalui berbagai pelatihan yang dirancang untuk kebutuhan UMKM serta Koperasi;
- 5). Kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha yang akan memperkuat posisi tawar UMKM serta Koperasi.
- 6). Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar memiliki pemilikan dan kemampuan sumberdaya yang sama. Dalam konteks ini, nuansa redistributif dalam setiap kebijakan investasi sangat diperlukan;
- 7). Menjalin kerjasama diantara masyarakat (pelaku ekonomi) yang sudah kuat dengan yang masih lemah melalui bentuk kemitraan dan "win-win solution";

7.4. Kawasan Investasi Prioritas

Dalam struktur PDRB provinsi tahun 2005, sektor pertanian masih menjadi primadona (27,24%) meskipun terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2001. Sumbangan subsektor kehutanan dan perikanan tangkap masih memberikan prosentase tersebar pada sektor pertanian, sedangkan kegiatan budidaya masih sangat kecil. Sektor industri pengolahan serta pertambangan umum dan mineral galian C masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDRB di urutan

kedua dan ketiga. Kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan pergerakan yang meningkat didorong oleh investasi minyak dan gas bumi yang terus meningkat (20%), sedangkan industri pengolahan tanpa migas masih terlalu kecil (7,17%). Di masa depan sebaiknya pengembangan ekonomi daerah tidak lagi bersandar pada sektor pembangunan primer dengan industri ekstraktif, sebaliknya kegiatan budidaya dan sektor jasa perlu didorong. Untuk menjaga pengembangan pembangunan dalam satu sasaran maka perlu ditetapkan kawasan investasi prioritas.

Kawasan investasi prioritas merupakan simpul-simpul pengembangan pembangunan yang dibentuk atas pertimbangan faktor-faktor geografis, aksesibilitas, pengikat, komoditi unggulan sejenis dan komplementer, keragaman komoditas unggulan antarkawasan, penyebaran pertumbuhan dan keselarasan. Pemilihan kawasan investasi prioritas selain berbasis keunggulan komparatif dengan faktor-faktor penunjang, juga mempertimbangkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan bagian penting dalam manajemen strategik, dimana suatu kawasan memiliki sesuatu yang berbeda dan tidak dimiliki oleh kawasan lain. Keunggulan kompetitif tidak bersifat kekal, jadi sewaktu-waktu bisa tergeser, sehingga perlu memahami lingkungan persaingan untuk antisipatif.